

## Kata pengantar

Alhamdulillah puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Peradaban Bangsa dengan Pancasila*. Buku ini ditulis sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam buku ini, dibahas secara lengkap tentang filsafat Pancasila, segi-segi persoalan seputar identitas nasional, segi-segi persoalan politik strategi nasional, demokrasi pancasila, hak asasi manusia dan *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia.

Buku ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mahasiswa dapat mengerti dan membedakan serta memecahkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Selain itu, melalui buku ini mahasiswa diharapkan menjadi ilmuwan (*intelektual*) yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mahasiswa juga diharapkan untuk bisa mengembangkan nilai-nilai yang demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Akhirnya Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Terutama kepada istri terinta Erwin Nur Rif'ah, PhD yang selalu memotivasi penulis untuk terus berkarya. Untuk anak-anakku tercinta, Muhammad Farrel Zharif Zidane, Naura Fathia Alfaaza, dan Muhammad Fachry Alfareeza yang yang keceriaannya selalu membuat penulis bahagia.

Ucapan terimakasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, ide dan saran dalam penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan buku ini, maka dari itu kritik

# Digital Repository Universitas Jember

dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan buku ini sangat penulis harapkan.

Tegalboto, Mei 2015

Penulis

(Honest Dody Molasy)



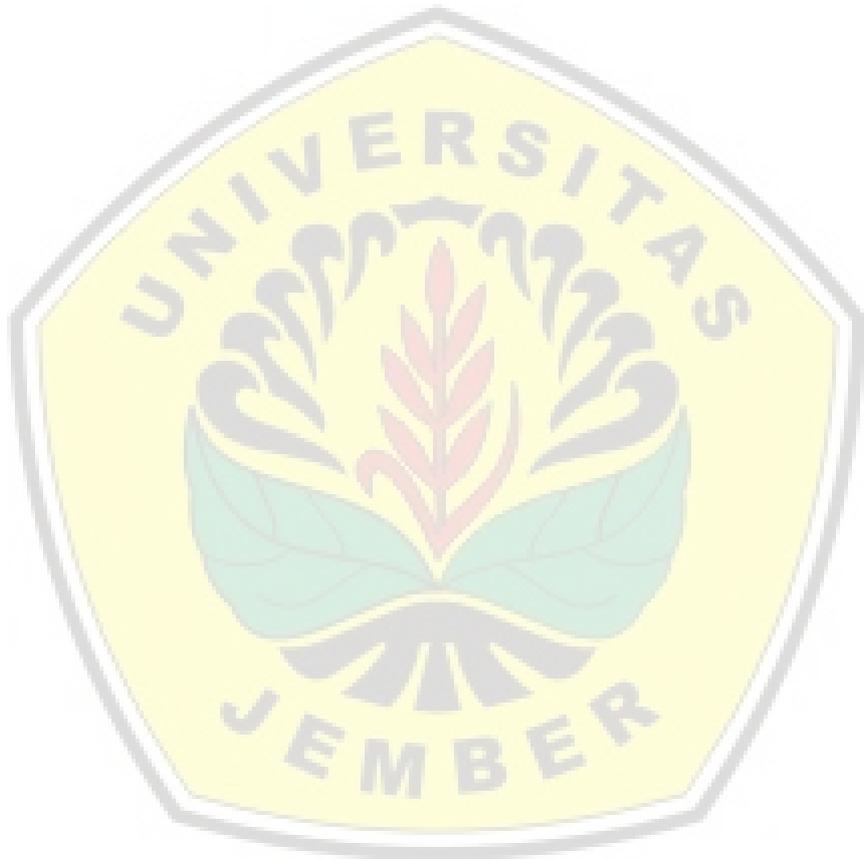
## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>TINJAUAN MATA KULIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I FILSAFAT PANCASILA .....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN .....	1
PEMBAHASAN .....	2
1. Pengertian Filsafat .....	2
2. Ruang Lingkup Filsafat Pancasila .....	4
3. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	10
4. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.....	12
KESIMPULAN .....	17
<b>BAB II SEGI – SEGI PERSOALAN SEPUTAR IDENTITAS</b>	
<b>NASIONAL.....</b>	<b>19</b>
PENDAHULUAN .....	19
PEMBAHASAN .....	20
1. Identitas Nasional.....	21
2. Karakteristik Identitas Nasional .....	25
3. Proses Berbangsa dan Bernegara.....	28
4. Studi Kasus.....	31
KESIMPULAN .....	33
<b>BAB III SEGI-SEGI PERSOALAN POLITIK DAN STRATEGI</b>	
<b>NASIONAL.....</b>	<b>34</b>
PENDAHULUAN .....	34
PEMBAHASAN .....	35

1. Pengertian Politik .....	35
2. Pengertian Strategi Nasional.....	37
3. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional .....	37
4. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.....	38
5. Stratifikasi Politik Nasional .....	38
6. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional .....	39
7. Implementasi Politik dan Strategi Nasional .....	41
KESIMPULAN .....	48
<b>BAB IV DEMOKRASI PANCASILA.....</b>	<b>49</b>
PENDAHULUAN .....	49
PEMBAHASAN .....	51
1. Definisi.....	53
2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Demokrasi Pancasila.....	55
3. Konsep dan Prinsip Demokrasi.....	57
4. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.....	60
KESIMPULAN .....	64
<b>BAB V HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN <i>RULE OF LAW</i>.....</b>	<b>65</b>
PENDAHULUAN .....	65
PEMBAHASAN .....	66
1. Sejarah dan Definisi Hak Asasi Manusia .....	68
2. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	70
3. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	70
4. Pengaturan Ham Dalam Hukum Positif Indonesia dan Instrument Nasional .....	72

5. Definisi dan Konsep <i>Rule of Law</i> .....	74
6. <i>Rule of Law</i> dalam Hukum Positif di Indonesia .....	76
KESIMPULAN .....	77
<b>BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>78</b>
PENDAHULUAN .....	78
PEMBAHASAN .....	79
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	81
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	83
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berbagai Bidang.....	86
KESIMPULAN .....	93
<b>BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA.....</b>	<b>94</b>
PENDAHULUAN .....	94
PEMBAHASAN .....	95
1. Sejarah Geopolitik .....	96
2. Pengertian Geopolitik .....	98
3. Objek Studi Geografi politik .....	100
4. Asas Wawasan Nusantara .....	100
5. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara .....	101
6. Pembangunan Geopolitik dalam Negara Kesatuan RI .....	101
7. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional.....	104
KESIMPULAN .....	109
<b>BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA.....</b>	<b>110</b>
PENDAHULUAN .....	110
PEMBAHASAN .....	111
1. Teori dan Konsepsi .....	111

2. Pengertian Geostrategi .....	111
3. Pengertian Geostrategi Indonesia .....	112
4. Hakikat Ketahanan Nasional .....	112
5. Sifat dan Asas Ketahanan Nasional .....	113
6. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional.....	117
7. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia.....	118
8. Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia.....	122
9. Hubungan Antar Gatra dalam Trigatra dan Pancagatra .....	123
10. Ancaman yang Dihadapi Trigatra dan Pancagatra Indonesia.....	125
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>131</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>141</b>



## BAB I FILSAFAT PANCASILA

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian filsafat Pancasila yang diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang ruang lingkup Pancasila, karakteristik sistem filsafat Pancasila, prinsip-prinsip filsafat Pancasila dan hakikat nilai-nilai Pancasila.

Menurut Ruslan Abdul Gani, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan substansi dan isi dalam pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila apabila didefinisikan secara ringkas, dapat diartikan dalam hal ini sebagai sebuah *refleksi kritis dan rasional, mengenai Pancasila sebagai dasar dari sebuah negara dan dalam kenyataan budaya bangsa, yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian pokok yang paling mendasar dan juga menyeluruh*. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, utama berkaitan karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para *the founding father* kita, selanjutnya dituangkan dalam suatu sistem. Dengan perkataan lain filsafat Pancasila merupakan suatu proses berfikir yang mendalam (*radikal*) tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bumi Indonesia yang melingkupi nilai agama, sosial dan budaya dalam sebuah wadah yang bernama ideologi bangsa (Pancasila).

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang jati diri bangsa sehingga bisa menjadi ilmuwan yang memiliki sikap profesional dan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, demokratis dan juga berpartisipasi aktif untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai dalam Pancasila. Kompetensi secara khusus yang diharapkan adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Pancasila sebagai sistem filsafat.
2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
3. Pancasila sebagai dasar negara.

## BAB II

### SEGI – SEGI PERSOALAN SEPUTAR IDENTITAS NASIONAL

#### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan segi – segi persoalan seputar identitas nasional dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang variable-variabel yang berkaitan dengan persoalan identitas nasional, identitas nasional sebagai alat untuk memacu semangat persatuan nasional dan identitas nasional sebagai alat untuk meningkatkan rasa nasionalisme.

Identitas nasional merupakan perwujudan dari karakteristik dan jiwa suatu bangsa, untuk melihat suatu karakteristik dan budaya suatu bangsa kita dapat melihat dari identitas nasional bangsa tersebut. Identitas nasional tumbuh di dalam diri masyarakat Indonesia yang berkembang dari berbagai aspek kehidupan dari banyaknya agama, suku dan ras yang terhimpun menjadi suatu wadah kesatuan Indonesia dengan menitik beratkan Pancasila sebagai landasan ideologis dan bhineka tunggal ika sebagai alat pemersatu bangsa. Sehingga penting bagi suatu bangsa untuk memiliki identitas nasional yang merupakan ciri khas dari bangsa tersebut, hal ini untuk melindungi budaya dan simbol-simbol negara yang menjadi salah satu identitas nasional untuk di-klaim dari negara asing.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta terhadap tanah air, demokratis dan juga berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Definisi Identitas nasional.
2. Karakteristik identitas nasional.
3. Proses berbangsa dan bernegara.

## BAB III SEGI-SEGI PERSOALAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian segi-segi persoalan politik dan strategi dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengertian politik, penyusunan politik dan strategi nasional dan implementasi politik dan strategi nasional.

Segi-segi persoalan politik dan strategi nasional, strategi nasional adalah suatu cara dalam melaksanakan politik nasional untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan, terutama oleh politik nasional. Dalam hal ini, strategi nasional disusun dengan politik nasional menggunakan strategi yang sifatnya jangka pendek dan jangka menengah serta juga jangka panjang dengan memperhatikan pokok-pokok pemikiran yang ada dalam Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Setelah diterapkannya pemilihan presiden secara langsung, Presiden mempunyai kewenangan (*legal formal*) untuk menyusun strategi nasional melalui visi dan misi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang (RPJMP) nasional. RPJMP nasional meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, pembangunan daerah (otonomi daerah), sumber daya alam dan pertahanan dan keamanan.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang jati diri bangsa sehingga bisa menjadi ilmuwan yang memiliki sikap profesional dan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Sistem konstitusi nasional.
2. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.

## BAB IV DEMOKRASI PANCASILA

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian demokrasi Pancasila dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang definisi dan penerapan demokrasi dan demokrasi Pancasila, sejarah pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Pancasila, dan visi dan misi pendidikan demokrasi.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan dan menjalankan kedaulatan rakyat yang dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonogaro S.H, “pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Demokrasi Pancasila haruslah sesuai dengan Pancasila itu sendiri yaitu sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang didasarkan pada kekuasaan rakyat namun tetap teguh memegang pancasila sebagai acuan (landasan) dalam menjalankan pemerintahan. Demokrasi di sini tidak cukup dari, oleh dan untuk rakyat, tetapi demokrasi pancasila yang dianut bangsa indonesia yaitu sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pancasila sebagai asas ideologi. Jadi, bukan demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin yang dianut bangsa Indonesia. Tapi demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk menjalankan pemerintahan demi tercapainya tujuan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan dan profesional dan memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta terhadap tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan

## BAB V HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN *RULE OF LAW*

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia (HAM) dan *rule of law* dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep hak asasi manusia dan penerapan konsep *rule of law*.

Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang melekat serta dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Hak asasi manusia harus dihormati dan dijaga, karena itu bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan (*humanity*). Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 berarti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak.

Konsep negara *rule of Law* adalah merupakan konsep negara yang saat ini dianggap paling ideal, istilah "*rule of law*" ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "supremasi hukum" (*supremacy of law*) atau "pemerintahan yang berdasarkan hukum," artinya hukumlah yang menjadi panglima bukan kekuasaan (*macht staat*).

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan yang memiliki sikap profesional yang rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Definisi hak asasi manusia.
2. Pengaturan HAM dalam hukum positif Indonesia dan instrumen internasional.
3. Penegakan HAM di Indonesia.
4. Definisi dan konsep *Rule Of Law*.
5. *Rule Of Law* dalam hukum positif di Indonesia.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian hak dan kewajiban warga negara dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara.

Warga negara dalam melakukan hak dan kewajiban harus didasarkan pada ketentuan aturan yang berlaku. Hak merupakan suatu hal yang mutlak didapatkan oleh setiap warga negara sejak kecil dan perlu diakui oleh suatu negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung tinggi serta melaksanakan aturan perundangan yang berlaku. Sehingga perlu adanya pertanggung jawaban atas hak dan kewajiban bagi warga negara yang baik.

Warga negara diartikan oleh beberapa ahli. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) bahwa pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Ada berbagai pandangan dan beberapa asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu melalui asas *ius soli* dan *ius sanguinis*, dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai kedua asas tersebut. Dalam kehidupan bernegara, warganegara mempunyai hak dan kewajiban dalam berbagai bidang seperti hak dan kewajiban dalam bidang politik, kewajiban dalam bidang ekonomi dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan dan profesional dan rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Definisi warga negara Indonesia.
2. Definisi hak dan kewajiban warga Negara.
3. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia.

### PEMBAHASAN

## BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian geopolitik indonesia dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang definisi dan konsep geopolitik dunia, konsep tentang geopolitik indonesia dan usaha-usaha untuk menghadapi geopolitik negara lain.

Berawal dari pengertian Geografi yang mempelajari tentang wilayah suatu negara. Fenomena geografi yang pada awalnya konsen mempelajari tentang geografi dan demografi suatu negara berlanjut membahas tentang geo politik suatu negara, yaitu sebuah kajian tentang wilayah suatu negara dari aspek politik. Geopolitik dalam hal ini mempelajari fenomena politik dari aspek atau pendekatan geografi. Geopolitik juga memaparkan dasar pertimbangan untuk menentukan arah dari kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Prinsip dalam geopolitik sendiri juga berkaitan tentang lokasi luasan dan wilayah suatu negara. Faktor lokasi merupakan faktor luas dan bentuk wilayah negara yang sangat penting di dalam melakukan analisis terhadap suatu negara untuk menghadapi berabagai ancaman.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan yang memiliki sikap profesional dan rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Definisi geopolitik dan geopolitik Indonesia.
2. Teori-teori geopolitik di dunia.
3. Konsep geopolitik Indonesia ( wawasan nusantara).
4. Peranan dan kedudukan geopolitik Indonesia (wawasan nusantara).
5. Tantangan geopolitik Indonesia (wawasan nusantara).
6. Upaya menghadapi geopolitik negara lain.

## BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA

### PENDAHULUAN

Materi yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian geostrategi Indonesia dan diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang definisi dan konsep geostrategi, penerapan konsep geostrategi Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara.

Geostrategi berasal dari dua kata, yaitu geo dan strategi. Kata geo yang berarti bumi, sementara strategi diartikan sebagai bentuk usaha dengan menggunakan kompetensi sumber daya, mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) untuk melaksanakan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Geostrategi dalam hal ini dapat diartikan sebagai strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Geostrategi juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan politik. Selain itu, geostrategi juga dapat diartikan sebagai metode atau seperangkat aturan untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan nasional melalui proses pembangunan yang selanjutnya memberikan arahan tentang bagaimana cara membuat strategi pembangunan dan mengambil keputusan yang terukur serta terimajinasi untuk dapat mewujudkan masa depan lebih baik lagi, lebih aman, dan bermartabat. Berbagai istilah untuk menjelaskan dari maksud geostrategi, namun intinya geostrategi merupakan strategi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik melalui proses pembangunan dengan mempertimbangkan geopolitik dan budaya suatu bangsa.

Setelah membaca bab ini. Secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisa tentang menjadi ilmuwan yang memiliki sikap profesional dan rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air, demokratis dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan kompetensi secara khusus adalah Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan:

1. Definisi geostrategi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta : Grafindo.
- Anonim. 2011. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara. <http://cheetz89.wordpress.co./2011/11/04/hak-dan-kewajiban-sebagai-warga-negara-indonesia.com>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Anonim, 2012. Hak dan Kewajiban Hukum Warga Negara. <http://7kuadrat.blogspot.com/2012/04/hak-dan-kewajiban-hukum-warga-negara.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Anonim. 2012. Hak dan Kewajiban Menurut para ahli. <http://njanksouljah.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Anonim. 2014. Pengertian Penduduk dan Warga Negara. <http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-penduduk-dan-warga-negara.html#>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015.
- Anonim. 2014. Pengertian Hukum Lengkap. <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hukum-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Anonim. 2014. Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara. <http://hukum.kompasiana.com/2014/06/03/hak-dan-kewajiban-setiap-warga-negara-662652.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Anonim. 2014. Pengertian Ekonomi Menurut Ahli. <http://multiajaib.blogspot.com/2014/10/pengertian-ekonomi-menurut-ahli.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Arif, Muhammad. 2014. *Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*. <https://arifashkaf.wordpress.com/2014/10/07/Pancasila-> (diakses pada tanggal 26 maret 2015 )
- Departemen pendidikan. 2012. *Modul Pendidikan Kewarnegaraan*. Jakarta : UI press.
- Djumhardjinis. 2012. *Pendidikan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* .Jakarta: Sendiri Widya Jakarta
- Hazani. 1983. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fadri, A. 2011. Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Hak Asasi Manusia*, 7 (1): 1-22.

- Frillyfayraituri. 2013. Asas – Asas Ketahanan Nasional. <https://frillyfayraitaru.wordpress.com/2013/04/23/asas-asas-ketahanan-nasional/>. Diakses pada tanggal 29 maret 2015.
- Herowati, septi. *Jurnal karakteristik identitas nasional*
- Haikal. 2014. Pelanggaran hak warga negara. <http://haikalberbagi.blogspot.com/2014/02/pelanggaran-hak-warga-negara.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Hayati, S., & A, Yani. 2007. *Geografi politik*. Bandung : PT refika Aditama. Calam, A., dan Sobirin. 2009. Formulasi Geopolitik di Era Reformasi. *Saintikom*. 7(2): 350-365.
- Hirakos. 2012. Sifat dan Asas Ketahanan Nasional. <https://hyrra.wordpress.com/2012/04/29/sifat-dan-asas-ketahanan-nasional/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2015.
- Irawan, A. 2013. Pengertian Warganegara. <http://andi-chodetz.blogspot.com/2013/04/pengertian-warganegara.html>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015.
- Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta:Paradigma.
- Kartono Kartini. 1996. *PendidikanPolitik*. Bandung: Mandiri Maju.
- Listiyarti, Retno.2007.*Pendidikan Kewarganegaraan*.jakarta: Erlangga.
- Mangindaan, R. 2012. Maritime Awarness : Fodasi Geopolitik Negara Kepulauan. *Quarterdeck*. 5(16): 1-16.
- Muhlashala. 2013. **Geostrategi Indonesia**. <https://muhlashala.wordpress.com/mata-kuliah-kewarganegaraan/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2015
- Putra, H. 2013. Pengertian Politik Menurut Para Tokoh. <http://herma-putra.blogspot.com/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.
- Purnamasari, M.W. 2011. *Geostrategi Indonesia*. <http://geostrategiindonesia.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2015
- Putri, N.I. 2013. Asas Asas Ketahanan Nasional. <https://nadillaikaputri.wordpress.com/2013/04/27/asas-asas-ketahanan-nasional/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2015
- Setijo, P. 1996. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Setijo, P. 2010. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Edisi Keempat)*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Surbakti Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia sarana
- Syam, M.N.1999. *Pancasila Dasar Negara Republik*

- Indonesia: Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis, dan Konstitusional*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang Sari, K. 2013. Pengertian Hak, Kewajiban dan Warga Negara. <https://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-hak-kewajiban-dan-warga-negara/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015.
- Sebastian, G. 2013. Penjelasan Atas Tiap Gatra Dalam Ketahanan Nasional. <http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2013/05/penjelasan-atas-tiap-gatra-dalam.html>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2015.
- Ubaedillah A. dan A. Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winataputra, Udin S. 2005. *Demokrasi dan pendidikan Demokrasi*, disampaikan Pada Suscadorwas 2005. Dikti: Jakarta.
- Yuliarso, K.K., dan N. Prajarto. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Goernances. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (3): 291-308.
- Widianto, E. 2010. Hak dan Kewajiban Bangsa Indonesia. <http://edywidianto.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban-bangsa-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2015.

## Glosarium

### A

Apatride

: Keadaan dimana seseorang yang lahir dan tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun.

**Apriori** : Berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan.

**Asas Ius Sanguinis** : Kewarganegaraan seseorang yang lahir didapat berdasarkan keturunannya.

**Asas Ius Soli** : Kewarganegaraan seseorang didapat berdasarkan tempat ia dilahirkan.

## **B**

**Bipatriide** : Keadaan dimana seseorang memiliki lebih dari 1 kewarganegaraan.

## **D**

**Demokrasi Pancasila** : Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945”.

**Dekrit** : Keputusan (perintah) yang dikeluarkan oleh kepala negara.

**Demokrasi** : Suatu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan dan menjalankan kedaulatan rakyat yang dari, oleh dan untuk rakyat.

**Dimensi fleksibilitas** : Ideologi yang memiliki sifat luwes yang memungkinkan dan bahkan mampu merangsang pengembangan pemikiran yang baru yang relevan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

**Dimensi idealistas** : Ideologi harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Dimensi realitas** : Ideologi yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakatnya.

**Dogmatis** : Mempercayai suatu keadaan tanpa adanya data yang valid

## **F**

**Filsafat Pancasila** : Refleksi kritis dan rasional tentang

Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

**Filsafat** : berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philein*, yang berarti cinta dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan.

## G

**Geopolitik** : Doktrin negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan(Karl Haushofer)

**Geostrategi Indonesia** : Strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

**Ground norm** : Hukum dasar.

## H

**Hak Asasi Manusia** : hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak (UU No. 39 tahun 1999).

**Hak** : Kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. (Prof. Dr. Notonagoro).

**Homo homini lupus** : Manusia menjadi mangsa bagi sesamanya.

**Hukum** : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti

peraturan hukum tentang kemerdekaan (Immanuel Kant).

## I

**Identitas nasional** : Ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.

**Ideologi doktriner** : Ideologi yang bersifat ketat dan mengandung ajaran-ajaran yang disusun secara rinci dan diindoktrinasikan, serta mempunyai pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.  
**Ideologi pragmatis**: Ideologi yang bersifat tidak ketat dan mengandung ajaran-ajaran yang tidak disusun secara rinci dan tidak diindoktrinasikan, serta tidak mempunyai pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.

**Ideologi komprehensif**: Suatu sistem pemikiran yang sifatnya menyeluruh yang mencakup semua aspek kehidupan sosial.

**Ideologi particular** : Suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan satu atau kelas sosial tertentu dalam masyarakat.

**Ideologi** : Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

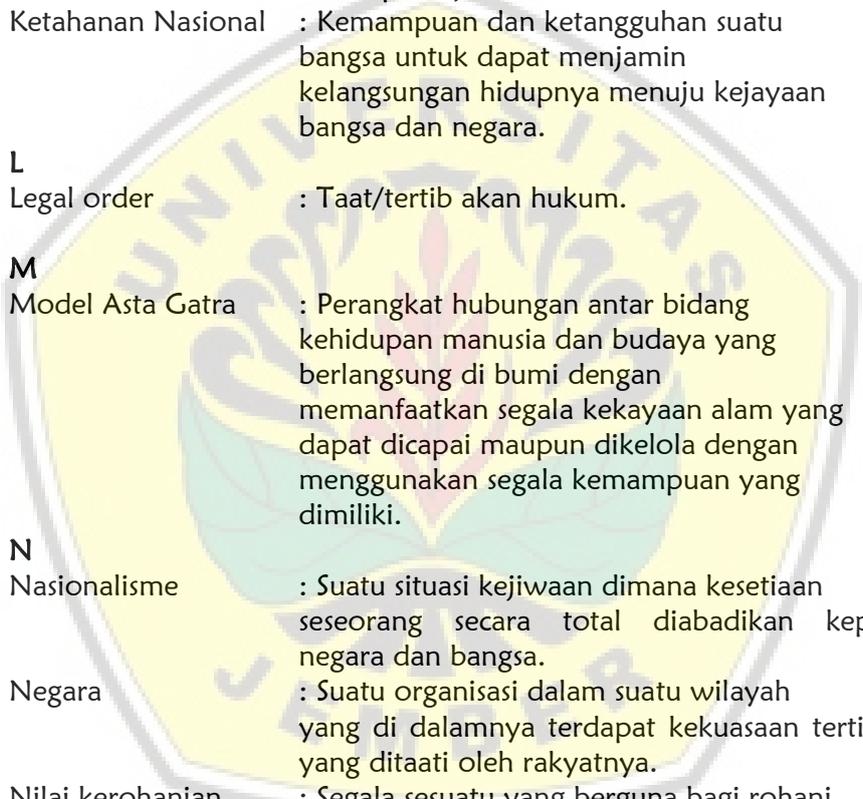
**Interest group** : Kelompok kepentingan.

**Politik** : berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politeia. Dimana polis berarti sekumpulan manusia yang mengurus negara sendiri, dan teia yang berarti urusan. Jadi politik itu sendiri merupakan langkah atau jalan bagi bangsa untuk mencapai tujuan yang mencangkup seluruh warga negara. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

## K

**Kausa Efisiensi** : Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

**Kausa Finalis** : Berhubungan dengan tujuannya, yaitu



	tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Kausa Formalis	: Sebab yang berhubungan dengan bentuknya.
Kausa Materialis	: Sebab berhubungan dengan materi/bahan
Kebijakan umum	: Suatu kumpulan perintah atau peraturan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan atau cara mencapai tujuan.
Ketahanan Nasional	: Kemampuan dan ketanggungan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
<b>L</b>	
Legal order	: Taat/tertib akan hukum.
<b>M</b>	
Model Asta Gatra	: Perangkat hubungan antar bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai maupun dikelola dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki.
<b>N</b>	
Nasionalisme	: Suatu situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan kepada negara dan bangsa.
Negara	: Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
Nilai kerohanian	: Segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan nilai religius.
Nilai material	: Segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. nilai vital: Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.

## **P**

- Pancasila aksiologis** : Pancasila berkenaan dengan apa itu hakikat dan manfaat dari Pancasila.
- Pancasila epistemologis**: Pancasila dijadikan sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan.
- Pancasila ontologism** : Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya menyangkut kesatuan sila-silanya saja, melainkan juga hakikat dasar dari sila-sila Pancasila.
- Pembangunan nasional**: merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- Pemisahan kekuasaan** : Dalam sebuah negara yang telah dibagi dalam lembaga negara tersebut menjalankan kewajibannya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif (trias politica).
- Pendidikan demokrasi** : Sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
- Preamble** : Pembukaan yang terdapat dalam UUD 1945.
- Pancagatra** : adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang intangible atau bersifat kehidupan sosial.
- Pressure group** : Kelompok penekan yang banyak mempunyai kepentingan.

## **R**

- Rule of law** : Merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

## S

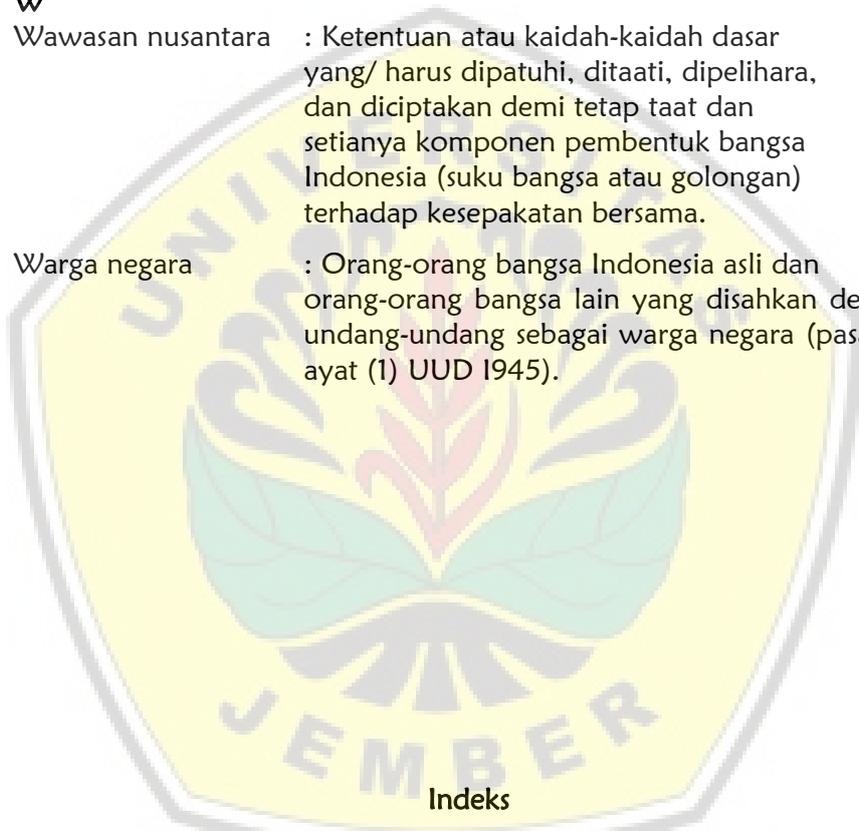
Strategi Nasional : Suatu cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Strategi trigatra : meliputi gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk.

## W

Wawasan nusantara : Ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang/ harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.

Warga negara : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (pasal 26 ayat (1) UUD 1945).



## Indeks

Demokrasi\_\_\_ 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 82, 130, 132, 133

Demokrasi Pancasila \_ 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64

Filsafat \_\_\_\_\_ 1, 2, 3, 4, 9, 134

Geopolitik indonesia \_\_\_\_\_ 96

Geostrategi Indonesia _____	112, 113, 120, 121, 122, 123
Hak asasi manusia _____	44, 45, 46, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 107, 109, 119
Hak dan kewajiban _____	30, 33, 51, 52, 69, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 90, 91, 92
Identitas nasional _____	19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 130
Ideologi _____	12, 13, 14, 15, 126, 133, 134, 135, 136
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara _____	11, 17, 18
Ketahanan Nasional _____	113, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 130, 131
Nilai Pancasila _____	9
Pancasila sebagai ideologi _____	1, 12, 13, 17, 18
Pembangunan nasional _____	40
Pembangunan Nasional _____	39, 106, 107, 108
Pendidikan demokrasi _____	49, 50, 61, 62
Pengertian Ideologi _____	13
Politik _____	4, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 48, 80, 81, 89, 90, 106, 109, 126, 131, 132, 136
<i>Rule of law</i> _____	65, 68, 75, 76, 77
Strategi Nasional _____	37, 38, 41, 138
Trigatra _____	125, 127
Warga negara _____	13, 20, 30, 32, 36, 52, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 107, 118, 120, 125, 126, 129, 131, 136, 138, 139

